**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab I penulis telah memaparkan latar belakang penelitian mengenai permasalahan kaum imigran di Amerika Serikat. Permasalahan ini penting untuk dibahas karena munculnya larangan kaum imigran untuk memasuki wilayah Amerika yang disampaikan oleh Presiden Trump. Hal ini disebabkan karena pemerintah yang dipimpin Presiden Trump menganggap kaum Imigran sebagai sebuah ancaman baru untuk Amerika. Bisa kita ketahui, selama masa kampanye Presiden Trump begitu semangat dalam jargon “*Make America Great Again*”. Partai Republikan yang mendominasi parlemen tentu memiliki paham yang sama dalam hal kaum imigran. Presiden Trump menganggap hal buruk yang terjadi di Amerika sebagian besar ditimbulkan oleh kaum Imigran.

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perlakuan tindakan diskrimanasi yang diterima oleh kaum Imigran pada pemrintahan Presiden Trump. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa literatur reviu serta teori yang relevan sebagai kerangka konseptual yang dapat menjadi pendukung dalam penelitian ini.

**2.1 Literatur Revieu**

Dalam menulis penelitian ini, penulis menghimpun dari berbagai sumber informasi beserta literatur penelitian yang terdahulu yang relevan dengan isu pembahasan penulis, baik itu beersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, *press release* , skripsi, dan berita-berita resmi. Berikut literatur yang penulis rujuk, **“Efektivitas Twenty First Century Border Management Amerika Serikat-Meksiko Dalam Penanggulangan Imigran”** yang ditulis oleh Adwiyanti TriPutri, Universitas Hassanudin Makassar. Dalam penelitian terdahulu ini mengkaji berbagai pembahasan meliputi seberapa besar pengaruh kebijakan Amerika Serikat dalam menanggulangi penanggulangan imigran ilegal di perbatasan. Dapat dilihat dari analisis implementasi Twentty First Century Border Management Amerika Serikat-Meksiko Dalam Penanggulangan Imigran Ilegal. Persamaan dari penelitian ini yaitu dalam mengkaji suatu kebijakan yang terjadi di perbatasan Amerika Serikat dalam kasus penanganan masuknya Imigran ilegal. Kebijakan yang dapat dianalisis merupakan kebijakan dari Presiden Donald Trump pada masa peemerintahannya.

Literatur selanjutnya mengenai kesejahteraan kaum Imigran yang penulis rujuk darikumpulan Jurnal Universitas Hassanudin karya Andi Hamina yang berjudul **Jurnal Kebijakan Imigrasi Presiden Barack Obama Dalam Perbaikan Kesejahteraan Perbaikan Imigran Illegal di Amerika Serikat dengan Studi Kasus *Deffered Action For Childhood Arrivals (DACA).***.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan latar belakang Presiden Barack Obama reformasi kebijakan imigrasi di Amerika Serikat dan dampak dari kebijakan imigrasi Presiden Barack Obama meningkatkan kesejahteraan imigran ilegal di Amerika Serikat.Metode penelitian digunakan isdescriptive-analitis. Teknik pengumpulan data adalah riset Perpustakaan Analisis secara kualitatif digunakan dalam menganalisis data, dan Deductive sebagai teknik menulis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa latar belakang Barack Obama dalam membuat kebijakan imigrasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang mencari kehidupan yang lebih baik, setiap orang yang ingin bekerja keras, berkontribusi terhadap negara, dan mewujudkan impian mereka untuk hidup dalam kebebasan. Dampak dari kebijakan imigrasi Presiden Barack Obama, yaitu ditangguhkan tindakan untuk masa kanak-kanak kedatangan (DACA) dapat memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi imigran ilegal.Ini adalah karena peningkatan mutu pendidikan, kesempatan kerja, meningkatkan gaji / pendapatan, kesempatan untuk memperoleh mengemudi lisensi, kesempatan untuk membuka rekening bank dan kartu kredit, lebih percaya diri dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dan perlindungan dari deportasi selama dua tahun.

Literatur selanjutnya adalah tulisan dari Philip Martin dan Elizabeth Midgley yang berjudul **Immigration : Shaping and Reshaping America, A Publication Population reference Bureau Vol.58 No.2**. Philip Martin mengenai pola dan kebijakan imigrasi di Amerika dengan meninjau pucak dan lembaha aliran imigrasi dan menawarkan perspektif historis tentang migrasi kontemporer yang mencakup fokus pada dampak ekonomi imigrasi. Pada dasarnya kebijakan imigrasi AS akan terus berubah dalam menanggapi arus imigrasi dan dampaknya terhadap orang Amerika.

Adanya kekhawatiran yang muncul karena implikasi ekonomi, politik, dan budaya dari imigrasi. Berbagai pendapat muncul bahwa imigran berkontribusi terhadap pertumbuhan populasi yang berlebihan serta membebani pendidikan dan biaya pelayanan lainnnya. Bahkan dalam sisi positif terdapat usulan tentang penghapusan batasan pada imigran karena masuknya konsumen dan pekerja baru dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat secara luas.

**Tabel 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Judul** | Skripsi : Efektivitas Twenty First Century Border Management Amerika Serikat-MeksikoDalam Penanggulangan Imigran | Jurnal Kebijakan Imigrasi Presiden Barack Obama Dalam Perbaikan Kesejahteraan Perbaikan Imigran Illegal di Amerika Serikat | Jurnal Immigration : Shaping and Reshaping America,A Publication Population reference Bureau Vol.58 No.2. |
| **Penulis** | Adwiyanti TriPutri | Andi Hamina | Philip Martin dan Elizabeth Midgley |
| **Isi Penelitian**  | Persamaan : Membahas mengenai latarbelakang Amerika dalam permasalahan kaum imigranPerbedaan : Membahas tentang masuknya imigran ke Amerika dan tindakan diskrimasi yang diterima oleh kaum imigran. | Persamaan: Membahas tentang bagaimana seharusnya kaum imigran diperlakukan.Perbedaan: Membahas tentang kebijakan Presiden Trump terhadap kaum Imigran. | Persamaan: Membahas tentang pola kebijakan terhadap imigran.Perbedaan: Membahas tentang sudut pandang kebijakan yang merugikan bagi imigran. |

* 1. **Kerangka Konseptual**

Kerangka teoritis merupakan sumber landasan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini menggunakan kerangka pemikiran guna membantu dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang berlandaskan teori-teori hubungan internasional yang tentunya swsuai dengan masalah yang diteliti, teori-teori yang penulis gunakan sebagai landasan untuk menganalisis adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan kerangka berikir deduktif atau pengambilan kesimpulan unutk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum dengan kerangka konseptual agar penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ruang lingkup Hubungan Internasionnal. Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai studi Hubungan Internasional K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, terjemahan Wawan Juanda, mengatakan :

**“Hubungan Internasional adalah kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, apakah interaksi itu disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Yang dimaksud oleh masyarakat dalam hal ini adalah suatu negara yang mempunyai batas-batas wilayah dan pemerintahannya serta kedaulatan di masing-masing wilayahnya merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan nasional setiap bangsa atau negara yang melalui interaksi dengan negara lain dimana interaksi tersebut dapat berbentuk hubungan antar pemerintah maupun antar negara. Hubungan diplomatik, persekutuan, aliansi, peperangan, negosiasi, ancaman kekuatan militer, budaya, ekonomi, ikatan ras dan etnik, dan hubungan antar manusia yang tinggal dinegara berbeda.”** **(K.J Holsti, 1987: 21-22).**

Adapun pendapat ahli menurut Anak Agunng Banyu Perwita dan yanyan Mochamad Yani dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, menyatakan bahwa:

**“Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang innteraksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubunngan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya salinng ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”**(Perwita & Yani, 2005)**.**

 Sedangkan Mochtar Mas’oed mendefinisikan studi Hubungan Internasional sebagai berikut :

**“Hubungan Internasional juga didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa terwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional” (**Mas’oed, 1994**).**

 Adanya interaksi dalam hubungan internasional meliputi kerjasama, persaingan, dan memungkinan terjadinya konflik. Pola interaksi tersebut terbentuk karena adanya kepentingan nasional dari masing-masing aktor state maupun non-state aktor yang terbentuk menjadi kebijakan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut.

 Dalam Hubungan Internasional yang menjadi salah satu pokok kajian adalah Politik Internasional yang meliputi berbagai bentuk kepentingan dan kekuasaan suatu negara. Umumnya dalam hubungan Internasional terdapat berbagai macam interaksi dalam ruang lingkup internasional, sedangkan dalam politik internasional berkaitan dengan masalah interaksi karena adanya tindakan suaru ngara berupa aksi atau respon dari negara lain.

 Menurut K.J. Holsti dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional karya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad yani meyatakan bahwa :

**“Politik Internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur *Power*, kepentinngan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambakan reaksi dan respon bukan aksi”**(Perwita & Yani, 2005)**.**

 Politik internasional merupakan suatu tindakan ngara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya lebih ditekankan pada soal-soal politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara tersebut (Dahlan, 1991). Studi Politik Internasional juga berfokus pada pola dan tindakan negara terhadap lingkugan luar yang dapat dikatakan sebagai sebuah sikap aksi-reaksi, respon yang timbul terhadap pandangan negara lainnya. Kajian dalam studi Politik Internasional adalah kepentingan dan unsur *power* didalamnya.

 Pemerintahan Presiden Trump menginginkan adanya pembatasan masuknya Imigran sejak masa ia terpilih menjadi kepala negara Amerika. Presiden Trump menganggap bahwa kaum Imigran menjadi salah satu beban yang cukup besar untuk Amerika. Sementara Presiden Trump ingin melindungi kesejahteraan warga Amerika dengan pelarangan masuknya Imigran ke wilayah Amerika.

 Politik luar negeri adalah bagian dari seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara. Selain itu, politik luar negeri dianggap sebagai sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, dengan mempertimbangkan juga tanggapan (respon terhadap kejadian di kancah internasional).

**“Politik luar negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam peraturan dunia internasional,**

**melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disbut kebijakan luar negeri**.(Perwita & Yani, 2005).

 Di dalam politik luar negeri terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel yang ada dalam politik luar negeri ke dalam lima kategori, yaitu :

1. Variabel *Ideosyncretic*

Variabel ini berkaitan dengan persepsi, *image* dan karakteristik pribadi *decision maker,* antara lain: ketenagan *versus*  ketergesagesaan, kemarahan *versus* prudensi, pragmatism *versus* ideologi yang bersifat pembasmian atau pemberantasan (*crusadism)*, keunggulan *versus* keterbelakangan, kreativitas *versus* penghancuran, ketakutan *versus* sikap percaya diri yanng berlebihan, dan lain-lain.

1. Variabel Peranan

Variabel peranan ini biasanya didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan perilaku yang diharapkan bagi presiden, menteri-menteri kabinet, birokrat (pejabat) tinngkat tinggi, wakil-wakil di kongres dan para senator, wartawan para pendidik, persatuam para buruh, dan para pemimpin kelompok penekan lainnya serta elit-elit yang mempengaruhi, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan.

1. Variabel Birokratis

Variabel ini menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Variabel-variabel birokratis meliputi struktur organisasi pemerintah, standar prosedur pelaksanaan perwakilan-perwakilan birokratis yang besar, proses pembuatan keputusan pada berbagai peringkat perumusan kebijaksanaan, berbagai teknik implementasi keputusan-keputusan politik, dan sikap para pejabat menyangkut dampak politik luar negeri terhadap politik domestik dan kesejahteraan umum negara.

1. Variabel Nasional

Yang termasuk ke dalam variabel-variabel nasional ini meliputi variabel lingkungan(*enviromental variables*) seperti luas , lokasi geografis, tipe daerah, iklim dan sumber-sumber alam negara. Selain itu, GNP, hasil pertanian dan industri, tingkat pertumbuhan konomi, kekuatan militer dan atribut-atribut dari kapabilitas *power* suatu negara juga termasuk ke dalam kategori variabel nasional.

1. Variabel Sistemik

Variabel sistemik meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan negara lain yang bisa merangsang respons politik suatu negara.

 Politik luar negeri dengan pemimpin negara tentu sangat erat kaitannya. Isu politik luar negeri pun mencuat dan mempengaruhi pemikiran pubik dalam memilih presiden. Publik lebih mengutamakan isu-isu domestik dibandingkan dengan isu-isu internasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka, misalnya ekonomi, pajak, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil (Yuliantoro & Dkk, 2017). Pada masa kampanye Trump telah menyebutkan isu-isu politik lur negeri yang disesuaikan dengan krisis yang terjadi , dan menuangkan dalam poin-poin janji kebijakan semasa kampanye yang utamanya berkaitan dengan keamanan nasional yang erat kaitannya dengan isu imigrasi dan terorisme. Setiap kebijakan Trump selalu menjadikan *America First* sebagai sebuah pondasi penting didalamnya. Slogan dalam setiap kampanye Trump *Make America Great Again* adalah sebuah tujuan utama yang ingin direalisasikan melalui berbagai kebijakan yang telah dibuat. Dalam berbagai kesempatan pidato yang Trump utarakan selalu menekankan bahwa setiap keputusan mengenai perdagangan, perpajakan, keimigrasian, dan persoalan luar negeri akan ditentukan untuk keuntungan para pekerja dan keluarga AS (eastspring investments, 2016) dengan terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika Serikat, maka masyarakat dunia harus siap dengan adanya politik luar negeri yang berlawanan dengan kebijakan umum AS selama ini. AS lebih isolasionis dan proteksionis yang berfokus pada pengetatan pengawasan atas batas-batas negara serta menerapkan imigrasi yang lebih selektif dan ketat (Yuliantoro & Dkk, 2017). Secara tidak langsung arah politk luar negeri Trump merupakan bentuk dari anti-hegemoni dan anti-multilateralisme yang telah dibangun sebelumnya. Karena Trump melihat bahwa hegemoni Amerika kini tidak lagi dapat memberikan manfaat bagi Amerika.

 Dalam studi kebijakan luar negeri terdapat asumsi bahwa kebijkan politik luar negeri sebuah negara bukan hanya dapat dilihat dari kebutuhan politik domestik yang ditujukan kepada negara lain, tetapi respon terhadap negara lain dalam sebuah sistem internasional. Menyoroti hubungan timbal balik antara struktur dan agen, menekankan bahwa peristiwa-peristiwa tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui pembuatan keputusan individual *bottom-up.* Maka kebijakan luar negeri menggarisbawahi pengaruh penting dari ruang pembuatan keputusan, pilihan dan tujuan di dalam politik global(Heywood, 2011).

Terdapat konsep dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang dikenal dengan model aktor rasional (*rational actors model).* Pendekatan ini dijalankan dengan memperhatikan beberapa instrumen, yaitu:

1. Pengidentifikasian persoalan secara mendasar
2. Menentukan tujuan/sasaran secara obyektif berdasarkan pada berbagai masukan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas
3. Menyesuaikan berbagai cara/lamgkah dalam mencapai sasaran serta mempersiapkan evaluasi untuk mencapai efektifitas dari kebijakan, kepercayaan dari publik hingga penyelarasan terhadap anggaran dan lain-lainnya (Heywood, 2011).

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri diperlukan pertimabangan aspek pengertian dari publik (*human recognition)*. Hal ini penting untuk membentuk sebuah kebijakan luar negeri yang memiliki legitimasi serta memiliki pola dan sudut pandang yang sama diantara *stakeholder*, baik pemerintah, legislatif, dan intitusi-institusi hingga kalangan masyarakat secra luas.

K J Holsti mengeluarkan argumen bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminnologi kepentingan nasional. Terdapat lima landasan pembuatan sumber kebijakan luar negeri AS, kelima landasan itu adalah:

1. *External Sources* (sumber eksternal) meliputi atribut-atribut yang ada pada sistem internasional dan pada karakteristik serta sikap suatu negara dalam menjalaninya. *External Sources* mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, kebijakan dan tindakan dari negara lain baik itu konflik maupun kerjasama, ancaman, dukungan yang baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi *foreeign policy* suatu negara.
2. *Social Sources* (sumber masyarakat) yaitu seluruh karakteristik sosial domestik dan sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Intinya adalah seluruh aspek non pemerintah dari sistem politik yang mempengaruhi *foreign policy*. Hal ini meliputi keadaan geografis, etnis, nilai atau norma yang berkembang di masyarakat, populasi, opini publik, dan lain-lain.
3. *Goverment Sources* (sumber pemerintah) meliputi seluruh elemen dari struktur pemerintahan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan akan pilihan *foreign policy* baik yang sifatnya memperluas atau membatasi pilihan yang akan diambil oleh para pembuat kebijakan, tentunya dalam lingkungan serta interaksi antar pihak-pihak didalam pemerintahan.
4. *Role Sources* (sumber peranan), role disini terkait dengan peranan atau status dari pemerintah sebagai pembuat keputusan.
5. *Individual Sources* (sumber individu) meliputi nilai-nilai dari seorang pemimpin atau pengambil keputusan sebagai ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latarbelakang pendidikannya, segala sesuatu yang mempengaruhhi perepsinya, karakter dan lain-lain. Hal-hal inilah yang mempengaruhi persepsi, pilihan-pilihan dan respon atau reaksi dari seorang pengambil keputusan dari pengambbil keputusan yang lain(Wittkoff, Kegley, & Scott, 2003).

 Kemudian Andrew Heywood menemukakan dalam esensi kebijakan luar negeri adalah untuk mewujudkan tercapainya kepentingan nasional. Kemampuan kolektif yag dimiliki sebuah negara dapat menjaga kelangsungan sosial-ekonominya melalui distribusi sumber daya alam dengan mengerahkan berbagai kemampuan yang ada (Heywood, 2011).

Trump untk pertama kali mengeluarkan pernyataan tentang kebijakan luar negeri saat menghadiri undangan Center for The national Interest di Washington, D.C,. April 2016. Trump mengatakan bahwa mengaplikasikan “*America First”* dalam kebijakan luar negerinya(Beckwith, 2016). Trump ingin memastikan bahwa warga Amerika menjadi prioritas utama dan keamanannya terkait dengan kebijakan luar negeri yang Trump inginkan.

Dalam kepentingan nasional peran “negara” sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negaranya. Kebutuhan suatu negara pada akhirnya menciptakan keberadaan dari kepentingan nasional. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, miiliter dan sosial-budaya. Kepentingan ini juga didasari akan ”*power”* yang ingin diciptakan sehingga akan berdampak pada pertimbangan negara untuk mendapat pengakuan dari dunia.

 Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesaamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan(Sitepu, 2012). Pada dasarnya kepentingan suatu bangsa dalam percaturan masyarakat ekonomi internasional tidak terlepas dari dua tujuan utama yaitu kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan (*welfare)*. Setiap negara didunia pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut meliputi upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyrakat, baik secara keseluruhan/individu tersebut dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang. Kepentingan nasional sebuah negara salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memajukan dan mengembangkan ekonomi negaranya.

 Adapun konsep Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton didefiniskan sebagai :

***“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decisions makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typical a highly generalize conception of these element that constituteto the state most vital needs. These include self preservation, independent, territorial integrity, military security, and economic well-being”*(Jack & Plano, 1999)**.

Pada dasarnya kepentingan suatu bangsa dalam percaturan masyarakat internasional tidak terlepas dari dua tujuan utama yaitu kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan (*welfare)*. Perlu diketahui, setiap negara didunia pasti memiliki tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut meliputi upaya dalam meningkatkan kesejateraan sosial ekonomi masyrakat, baik secara individu maupunn keseluruhan yang dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang. Kepentingan nasional sebuah Negara salah satu yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memajukan dan mengembangkan ekonomi negaranya.

Para imigran dianggap sebagai kelompok yang cukup berpotensi dalam mengambil peluang kerja masyarakat AS dibanding dengan penduduk asli. Persaingan ini menjadi sebuah masalah besar karena terjadi gesekan untuk mendapatkan pekerjaan antara imigran dengan penduduk lokal. Jika persaingan ini semakin panas, Trump menganggap kesejahteraan masyarakat asli AS terhambat oleh keberadaan Imigran. Hal ini dianggap akan menjadi sebuah kegagalan dalam mewujudkan kepentingan nasional Amerika

Sementara itu, kebijakan luar negeri Donald Trump dianggap telah melakukan sekuritisasi untuk wilayah Amerika terkait dengan pandangan bahwa terancamnya keamanan Amerika dikarenakan oleh Imigran. Teori sekuritisasi menjelaskan tentang proses memenuhi keberlangsungan hidup dengan menempatkan beberapa isu publik yang awalnya bersifat non-tradisional menjadi sebuah ancaman yang dapat mengganggu subjek keamanan.

**“Sekuritisasi akan diawali dengan proses kontruksi isu keamanan (apa dan siapa yang diamankan, dan terhadap ancaman apa) yang dianalisa melalui *speech act* (pidato atau penyampaian pernyataan kepada khlayak umum. Dan pidato tersebut dibentuk menjadi sebuah isu keamanan dikaenakan penyampaian yang meyakinkan bahwa isu non tradisional itu mengancam. Walaupu dimungkinkan jika melihat dari perspektif keamanan tradisional, isu tersebut tidaklah menagncam masyrakat atau negara.”**(William, 2003)

Objek keamanan adalah negara Amerika Serikat, termasuk didalamnya masyarakat, wilayah dan identitas nasional. Penggolongan dari aktor sekurittisasi ini merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mengeluarkan *speech of act.* Umunya yang menjadi aktor dari sekuritisasi adalah pemimpin politik, birokrat, pemerintah , dan kelompok penekan *(pressure groups)*. Donald trump merupakan salah satu pemegang penting dalam *securitizing actor* sejak Trump mencalonkan diri sebagai Presiden dari Partai republik hinngga menjadi presiden terpilih Amerika Serikat. Trump sangat mengutamakan penyampaian pidato yang terkesan menggebu dalam setiap aksi pidatonya. Ini merupakan salah satu cara Trump untuk menarik perhatian masyarakat. Dalam konteks ini, audiens adalah masyarakat Amerika dan aktor secara fungsional merupakan para pendukung trump baik anggota dari Partai Republik ataupun simpatisannya.

 Setiap tindakan sekuritisasi meliputi keputusan politik dan hasil dari kebijakan politik dan sosial(Emmers, 2002). Hanya saja tindakan sekuritisasi yang sukses adalah ketika dianggap kebijakan politik yang diberlakukan selama ini tidak sanggup mengatasi ancaman yang datang. Tahap selanjutnya yang merupakan respon dari pernyataan yang telah diterima oleh audiens. Kemudian aktor sekuritisasi membuat aksi luar biasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Aksi tersebut untuk meningkatkan level tindakan dari yang sebelumnya pernah dilakukan.

 Pada buku *Security: A New Framework for Analysis,* menyyebutkan lebih spesifik meringkas adanya tiga isu yang umumm dianggap sebagai ancaman terhadap sektor kemasyarakatan, yaitu :

1. Migrasi yang dijelaskan sebagai fenomena orang-orang X berpindah atau terpisah karena pengaruh dari orang-orang Y. Komunitas X ini tidak lagi seperti mereka yang sebelumnya di tempat asalnya, tetapi akan terkontaminasi sesuai dengan populasi di tempat tujuan perpindahan.
2. *Horizontal competitions*, dijelaskan meskipun orangorang X masih tinggal di tempat asalnya akan tetapi akibat dari pengaruh budaya dan bahasa di tempat tetangga sehingga mereka pun mengikuti pengaruh dari orang-orang Y.
3. *Vertical competitions*, orang-orang akan berhenti menganggap dirinya sebagai X, karena telah dilakukan proyek integrasi atau suksesi yang mengakibatkan mereka meluaskan identitas atau memecahkan identitasnya.

Negara memainkan peran dalam mengatasi sebuah ancaman karena negara juga terbentuk oleh masyrakat-masyarakat yang berada di wilayah tesebut. Seperti contoh, mengatasi ancaman dari migrasi, negara menerapkan undnag-undang dan kontrol terhadap perbatasan. Pada kasus isu perbatasan dan migrasi di Amerika Serikat, penanggulangan isu dilakukan oleh negara melalui representasi Donald Trump sebagai presiden.

Terdapat berbagai teori yang menjelaskan tentang terjadinya migrasi internasional. Fenomena migrasi internasional merupakan bagian dari teori system dunia (*world system theory)* dan pendekatan struktur historis (*historical structural approach)* yang menjelaskan migrasi sebagai sebuah konsekuensi natural dari globalisasi ekonomi dan ekspansi hubungan ekonomi kapitalis, serta migrasi sebagai suatu alat untuk memobilisasi tenaga kerja murah untuk kapital.

Migrasi internasional dapat dikatakan sebagai sebuah kajian yang terkait dengan pembahasan perang, konflik dan bencana alam. Terjadinya migrasi internasional yang dilakukan oleh para migran bukan dilakukan secara sukarela melainkan terpaksa (*forced migration)*. Koser menekankan pembahasan mgrasi ireguler dan keamanan negara pada tarik menariknya konsep hak dan negara untuk mengontrol perbatasannya demi menjaga kedaulatan dengan menjunjung hak prerogatid dalam hak asasi manusia(Koser, 2005). Penanganan pengungsi dan migran ireguler merupakan suatu isu yang banyak diperdebatkan, mengingat banyak kasus yang memperdebatkan dimana negara penerima dianggap gagal dalam mengontrol permasalahan ini dan dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan.

Kebijakan untuk mengontrol migrasi ireguler mengalami perkembangan dari awal tahun 1990-an dan kebijakan berubah semakin ketat dan terbilang tertutup banyak diambil oleh negara-negara penerim setelah terjadinya tragedi *World Trade Center* pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan kebijakan negara-negara penerima mengalami perubahan, karena dapat dilihat dari beberapa tahapan migrasi yakni mulai dari pengaturan pra-kedatangan, pengaturan perbatasan, dan pengaturan setelah kedatangan.

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi ahli yang dikembangkan diatas maka penulis membuat sebuah Hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan masih perlu diuji kebenarannya. Maka dari itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Sikap dan tindakan anti imigran presiden Donald Trump yang bersifat diskriminatif mengundang reaksi berupa tuntutan masyarakat serta tekanan parlemen untuk bersikap toleran serta kesetaraan perlakuan bagi keberadaan hak sosial-politik kaum Imigran di Amerika Serikat ”**

**2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator**

Tabel Verifikasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel Dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:Sikap dan Tindakan anti imigran Donald Trump yang bersifat diskriminatif menimbulkan reaksi | 1. Tuntutan masyarakat di Amerika Serikat
2. Tekanan parlemen di Amerika Serikat
 | 1. Masyarakat melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap pelarangan masuknya Imigran

Sumber : <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/29/protest-trump-travel-ban-muslims-airports>1. Penolakan terhadap pelarang Imigran dari sejumlah pemerintah kota di AS kepada Donald Trump Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38755967>
2. Partai Republik menyampaikan respon terhadap keputusan Donald Trump mengenai *shutdown* yang berdampak pada pelayanan nasional

Sumber : <https://www.politico.com/story/2019/01/28/government-shutdown-republicans-trump-1133101>1. Perseteruan yang terus terjadi terkait persoalan dana pembangunan tembok pembatas di perbatasan Mexico antara anggota Kongres dengan Presiden Trump .

Sumber : <http://time.com/5595927/judge-halts-trump-border-wall/>  |
| Variabel Terikat:Kesetaraan perlakuan bagi hak-hak sosial politik kaum imigran di Amerika Serikat | 1. Sikap toleransi
2. Perlakuan kesetaraan kaum Imigran di Amerika Serikat
 | 1. Florida menjadi salah satu negara bagian di Amerika yang menjadi rumah bagi kaum Imigran .

Sumber : <https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-florida>1. Hak sosial yang diterima oleh kaum Imigran dengan adanya program DACA (*Deferred Action for Childhood Arrival)* memberi kesempatan untuk memperoleh hak pendidikan yang sama dengan warga asli Amerika.

Sumber : <https://www.teachforamerica.org/how-to-join/eligibility/daca>1. Perluasan lapangan pekerjaan dengan adanya kaum Imigran di Amerika dapat meningkatkan perekonomian yang cukup baik.

Sumber : <https://www.usatoday.com/story/money/2017/09/08/dacas-end-would-hurt-economy-hiring/638835001/> |

**2.5 Skema dan Alur Penelitian**

Hak-Hak Sosial Politik Kaum Imigran

Sikap Politik Presiden

Parlemen di Amerika Serikat (Kongres dan Senat)

Kesetaraan Toleransi

Undang -Undang tentang Imigran

Kebijakan Politik Anti Imigran di Amerika Serikat

Presiden Trump

Kaum Imigran